

## Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengiriman Barang Oleh Kantor Pos Cabang Tanjungpinang

Surya Kusumah<sup>1</sup>, Satriadi<sup>2</sup>, Tubel Agusven<sup>3</sup>, Raja Hardiansyah<sup>4</sup>

<sup>1)</sup> Manajemen, STIE Pembangunan Tanjungpinang

<sup>2)</sup> Manajemen, STIE Pembangunan Tanjungpinang

<sup>3)</sup> Manajemen, STIE Pembangunan Tanjungpinang

<sup>4)</sup> Manajemen, STIE Pembangunan Tanjungpinang

sekretariat@stie-pembangunan.ac.id

### Abstrak

**Keywords:**  
Kepuasan,  
Pelayanan Publik,  
Masyarakat

*Pelayanan publik merupakan tanggungjawab pemerintah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah baik di pusat, daerah maupun di ruang lingkup BUMN. Dalam hal ini, salah satu pelayanan public yang kita rasakan adalah kantor pos. Kantor pos adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dimana bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pada saat ini, Kantor Pos mengalami penurunan dalam eksistensinya karena kalah bersaing dengan hadirnya perusahaan swasta yang serupa. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan yang diberikan tidak dapat menyaingi pesaing yang ada. Kualitas pelayanan merupakan unsur yang penting dalam memenuhi keputusan masyarakat. Untuk mengukur kepuasan masyarakat tersebut, maka dilakukanlah penelitian dengan menggunakan indeks kepuasan masyarakat sebagai dasarnya. Dalam kesempatan ini, kami melakukan penelitian dengan menggunakan metode angket/kuisisioner dan berpedoman pada PERMENPAN-RB (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) No.14 Tahun 2017 dimana terdapat 9 unsur yang harus diteliti. Dari penelitian yang dilakukan tentang “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengiriman Barang oleh Kantor Pos Cabang Tanjungpinang” kami mendapatkan hasil bahwa pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pos dibidang pengiriman barang masih kurang baik.*

### 1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik/Masyarakat merupakan salah satu pelayanan yang ditawarkan oleh Pemerintah dan menjadi tanggung jawab bagi Pemerintah, Baik yang berada di pusat, di daerah maupun di ruang lingkup BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Pelayanan yang ditawarkan berbentuk fasilitas maupun jasa. Pelayanan yang banyak ditemukan antara lain di PLN, PDAM, Bandara, Telkom dan lain sebagainya. Jika dilihat pada saat ini, besarnya peranan informasi bagi public akan membawa dampak pada setiap pelayanan yang diberikan.

Meningkat kualitas pelayanan yang dapat ditunjukkan dengan produktivitas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan/Organisasi. Semakin banyaknya complain dan masalah pada pelayanan kepada public/masyarakat yang masih belum memenuhi Standar operasional Perusahaan (SOP), maka dari itu penelitian kami mengambil tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pada kesempatan ini kami sebagai peneliti mengambil tentang pelayanan masyarakat yang ada di Kantor Pos khususnya dibidang pengiriman barang. Pos merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang pelayanan POS. POS juga berbentuk pereseroam terbatas (PT) yang bertujuan mencari keuntungan.

Pada saat ini, kantor pos mengalami penurunan dalam eksistensinya, karena kalah bersaing dengan hadirnya perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang yang sama. Hal ini juga dapat disebabkan karena kualitas pelayanan yang diberikan tidak dapat menyaingi pesaing lainnya. Kualitas pelayanan adalah unsur yang sangat penting dalam pemenuhan kepuasan masyarakat agar dapat mengukur kepuasan dengan pelayanan yang diberikan. Maka dari pada itu, dilakukanlah penelitian tentang indeks kepuasan masyarakat.

Pada prinsipnya, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pada PT POS Indonesia adalah pelayanan yang berkualitas atau memberikan jaminan mutu bagi pelanggannya. Maka dari pada itu, produk layanan dan jasa yang diberikan PT POS Indonesia wajib memenuhi standar kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi *PERMENPAN-RB NO 14 THN 2017*, yang meliputi 9 aspek yaitu :

- persyaratan;
- system, mekanisme dan prosedur;
- waktu penyelesaian;
- biaya/tarif;
- produk spesifikasi jenis pelayanan;
- kompetensi pelaksana;
- perilaku pelaksana;
- penanganan, pengaduan, saran dan masukan;
- sarana dan prasarana.

Menurut Ibrahim dalam (Angga, Dan, & Yuliani, n.d.), kualitas pelayanan publik adalah sebuah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut. Gronroos dalam (Japarianto, 2014) menyatakan bahwa pada dasarnya kualitas pelayanan yang dinilai oleh pelanggan meliputi 2 dimensi, yaitu “*a technical quality or outcome quality and a functional quality or Interaction quality*”.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan khususnya dibidang pengiriman barang pada Kantor POS yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No.47 Kota Tanjungpinang Povinsi Kepulauan Riau. Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat membantu Kantor POS untuk mengetahui seberapa besar kepuasan masyarakat Kota Tanjungpinang terhadap pelayanan yang diberikan khususnya pada bidang pengiriman barang.

### **Tinjauan Teoritis**

Dalam melakukan penelitian tentang “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadapnya Pelayanan Pengiriman Barang Pada Kantor Pos cabang Tanjungpinang”. Kami melakukan peninjauan terhadap penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya melalui jurnal-jurnal sebagai kerangka acuan untuk penelitian. Selain dari jurnal, ada juga pengambilan bahan penelitian dari sejumlah buku dan sumber di internet. BUMN adalah badan usaha milik Negara yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang di pisahkan (Suganda, Sinarwati, & A, 2015).

Pos adalah layanan komunikasi tertulis dalam hal ini adalah surat elektronik, pelayanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum, sedangkan kantor pos adaah unit kerja pelaksanaan teknis yang melakukan kegiatan pelayanan dan penjualan di loket untuk semua produk dan jenis layanan dan penanganan informasi serta keluhan pelanggan (Susilowati, 2014).

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat yang berupa angka-angka dengan di tetapkan melalui skala 1 sampai dengan 4. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.Kep/708/M.PAN/14/2017

tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan public. Dalam mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat ada unsur-unsur survey yang tercantum dalam peraturan tersebut meliputi :

1. Persyaratan adalah syarat yang harus di penuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. System, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan yang ada.
4. Biaya atau Tarif adalah tarif yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam pengurusan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan yang besarnya ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan penyelenggara layanan. Produk layanan ini merupakan hasil dari setiap golongan jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan, pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

.Kepuasan masyarakat adalah faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu badan usaha. Karena masyarakat ialah konsumen dari produk yang dihasilkan. Maka dari itu , badan usaha harus dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat sehingga mencapai kepuasan masyarakat dan kedepannya dapatkan kesetiaan masyarakat(Mote, 2008).

Kesetiaan masyarakat akan menjadi pelanggan tetap bagi penyelenggara pelayanan dan akan dituntut untuk memberikan kepuasan bagi pelanggannya. Kepuasan pelanggan ialah respon dari perilaku yang di tunjukkan oleh pelanggan dengan membandingkan antara kinerja atau hasil yang di rasakan sesuai dengan harapan. Namun jika hasil yang dirasakan di bawah harapan, maka pelanggan akan kecewa, kurang puas ataupun tidak puas. Sebaliknya bila sesuai dengan harapan pelanggan maka pelanggan akan puas dan kinerja melebihi harapan pelanggan akan sangat puas(Farokha & Syafi'i, n.d.).

Seiler, Rudolf dan Krume dalam (Belás & Gabčová, 2014) menemukan bahwa nilai layanan tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kesetiaan pelanggan. Dampak nilai layanan terhadap kesetiaan pelanggan sepenuhnya dimediasi oleh kepuasan pelanggan.

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) sebagai sebuah usaha untuk membantu mengurus atau menyiapkan apa yang di butuhkan orang lain. Pelayanan publik adalah produk birokrasi publik yang di terima oleh warga pengguna maupun masyarakat luas, oleh karena itu pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai serangkaian aktivitas yang di lakukan oleh birokrasi publik guna memenuhi kebutuhan warga pengguna(Kartika, 2013).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia NO. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pada Pasal 1 menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Ruang lingkup yang mencakup pelayanan publik yang tercantum dalam UU No.25 Tahun 2009 yaitu meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi : Pendidikan, Pengajaran, Pekerjaan, Dan usaha, Tempat Tinggal Komunikasi dan informasi, Lingkungan

hidup, kesehatan, Jaminan sosial, Energi, Perbankan, Perhubungan, Sumber daya alam, Pariwisata dan Sektor strategis lainnya.

## 2. METODE PENELITIAN

Data metode penelitian dilakukan dengan studi literatur yaitu melalui jurnal yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dan melalui artikel dari buku dan internet serta dengan membagikan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawab (Sukanti & Utomo, 2004). Subjek pada penelitian ini adalah kantor pos di bidang pelayanan barang, sedangkan objek penelitiannya adalah masyarakat. Alat dan bahan yang di gunakan pada penelitian ini meliputi handphone sebagai alat foto, pena, kertas, flashdisk sebagai alat penyimpanan data dan laptop sebagai alat untuk mengerjakan penelitian ini. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang dapat diperoleh dari literatur seperti buku maupun jurnal (Moleong, 2007).

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat tentunya tidak hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah di bagikan kepada masyarakat saja, akan tetapi disini penulis juga menggunakan acuan dari utusan menteri PAN-RB No.708/KEP/PERMENPAN-RB/14/2017 Tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan 9 unsur yang ada, penulis menggunakan unsur tersebut sebagai acuan tolak ukur untuk menentukan tingkat kualitas pelayanan yang di berikan oleh pihak kantor pos cabang tanjungpinang pada masyarakat sudah baik atau belum. Setiap pertanyaan dari 9 unsur tersebut diberi bobot nilai. Kualitas pelayanan yang dinilai berdasarkan kategori sebagai berikut (Bobot nilai yang diberikan):

- A. Tidak Baik ( Bernilai 1 )
- B. Kurang Baik ( Bernilai 2 )
- C. Baik ( Bernilai 3 )
- D. Sangat Baik ( Bernilai 4 )

Nilai IKM dihitung menggunakan “ Nilai Rata-rata Tertimbang “ dari masing-masing unsur pelayanan yang ada. Dalam perhitungan survey kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang diteliti, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang di tetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Selanjutnya untuk mendapatkan nilai SKM unit pelayanan berdasarkan data responden menggunakan pendekatan metode rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Kemudian untuk mempermudah interpretasi terhadap penelitian SKM yaitu antara 25 hingga 100. Maka hasil dari penelitian yang ada di konversikan dengan nilai 25 dan rumusnya sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$$

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Berikut ini adalah ukuran nilai dengan kategori berdasarkan table nilai persepsi interval SKM, Interval konversi SKM, mutu dan kinerja unit pelayanan :

Tabel. 1.1

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

| NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL (NI)   | NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | MUTU PELAYANAN (x) | KINERJA UNIT PELAYANAN (y) |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>1</b>       | <b>1,00 – 2,5996</b>  | <b>25,00 – 64,99</b>          | <b>D</b>           | <b>Tidak baik</b>          |
| <b>2</b>       | <b>2,60 – 3,064</b>   | <b>65,00 – 76,60</b>          | <b>C</b>           | <b>Kurang baik</b>         |
| <b>3</b>       | <b>3,0644 – 3,532</b> | <b>76,61 – 88,30</b>          | <b>B</b>           | <b>Baik</b>                |
| <b>4</b>       | <b>3,5324 – 4,00</b>  | <b>88,31 – 100,00</b>         | <b>A</b>           | <b>Sangat baik</b>         |

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data kuesioner yang telah dikumpulkan mengenai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengiriman barang pada kantor pos cabang tanjungpinang dapat disimpulkan bahwa :

Tabel 1.2. Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Kualitas Pelayanan

| No | Unsur-unsur Pelayanan                   | Nilai Unsur Pelayanan |
|----|---|-----------------------|
| 1  | Persyaratan                             | 2,79                  |
| 2  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur         | 2,83                  |
| 3  | Waktu Penyelesaian                      | 2,80                  |
| 4  | Biaya Tarif                             | 2,87                  |
| 5  | Produk Spesifikasi Jenis pelayanan      | 2,98                  |
| 6  | Kompetensi Pelaksana                    | 2,84                  |
| 7  | Perilaku Pelaksana                      | 2,76                  |
| 8  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 2,85                  |
| 9  | Sarana Prasarana                        | 2,81                  |

Berdasarkan table 1.2 diketahui bahwa dari 9 (Sembilan) unsur yang dilakukan dalam survey kepuasan masyarakat, maka didapatkan unsur produk spesifikasi jenis pelayanan yang memiliki angka tertinggi yaitu 2,98 sedangkan yang terendah yaitu unsur perilaku pelaksana yaitu 2,76. Kemudian untuk mengetahui nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) dari unsur di atas dapat di hitung dengan cara sebagai berikut :

$$(2,79 \times 0,11) + (2,83 \times 0,11) + (2,80 \times 0,11) + (2,87 \times 0,11) + (2,98 \times 0,11) + (2,84 \times 0,11) + (2,76 \times 0,11) + (2,85 \times 0,11) + (2,81 \times 0,11) = 2,8083$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut didapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan pengiriman barang di kantor Pos Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

- Nilai SKM = 2,8083
- Nilai SKM setelah di konversional =  $2,8083 \times 25 = 70,2075$
- Mutu Pelayanan yang didapatkan adalah C
- Kinerja unit berarti kurang baik

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa nilai Indeks dari hasil perhitungan yang di dapat dari survey kepuasan masyarakat dengan patokan jumlah dari 9 unsur adalah 2,8083 dan setelah dikonversikan menjadi 70,2075. Dengan mengacu pada putusan Menteri No.708/KEP/PERMENPAN-RB/14/2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik, maka dinyatakan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengiriman barang pada kantor pos cabang Tanjungpinang dikategorikan C yaitu masih kurang baik. Hal ini berarti masyarakat masih belum merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor POS Tanjungpinang dalam memberikan pelayanan pengiriman barang. Masyarakat Tanjungpinang lebih merasa puas pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta seperti JNT maupun JNE dalam proses pengiriman barang.

#### 4. KESIMPULAN

Jadi dari hasil perhitungan, dapat dikatakan pelayanan pengiriman barang pada Kantor Pos cabang Tanjungpinang dikategorikan "Kurang Baik". Sehingga kantor POS Tanjungpinang harus melakukan beberapa terobosan untuk mengatasi hal tersebut. Adapun saran yang dapat kami berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

Sebaiknya manajemen dari kantor pos cabang Tanjungpinang lebih memperbaiki lagi terutama dalam kualitas pelayanannya dan melakukan evaluasi kembali dalam memberikan pelayanan pengiriman barang. Kemudian berdasarkan keputusan menteri PAN No.708/KEP-PERMENPAN-RB-14-2017. Mengatakan bahwa untuk membandingkan indeks kerja unit

pelayanan secara berkala diperlukan survey secara periodic dan berkesinambungan. Dengan demikian dapat diketahui perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik. Jangka waktu survey antara periode yang satu ke periode berikutnya dapat dilakukan 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan atau sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam melakukan penelitian ini penulis banyak mendapatkan dukungan bantuan baik moral maupun materil dari beberapa pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada STIE Pembangunan, dan Kantor POS Tanjungpinang Kota Tanjungpinang yang telah mendukung penuh kegiatan penelitian ini.

#### REFERENSI

- Angga, A., Dan, L., & Yuliani, F. (n.d.). Kualitas Pelayanan PT . Pos Indonesia ( Persero ) ( Studi Kasus Pengiriman Pos Express di Kantor Pos Pekanbaru 28000 ).
- Belás, A., & Gabčová, L. (2014). Reasons for Satisfaction and Dissatisfaction of Bank Customers. Study from Slovakia and the Czech Republic. *International Journal of Entrepreneurial Knowledge*, 2(1), 4. <https://doi.org/10.15759/ijek/2014/v2i1/53759>
- Farokha, D. R., & Syafi'i, A. (n.d.). Kualitas Pelayanan Pengiriman POS Express di PT. POS Indonesia Cabang Baratajaya Surabaya, 58–67.
- Japarianto, E. (2014). Evaluasi Customer Pt Pos Indonesia Ditinjau Dari Kepuasan Kepercayaan Dan Switching Barriers. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 8(1), 18–26. <https://doi.org/10.9744/pemasaran.8.1.18-26>
- Kartika, R. (2013). Tingkat Kepuasan Pelanggan Pada Penerapan Layanan Jasa Keuangan PosPayment (PosPay) di Kantor Pos Cabang Simpang Surabaya.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mote, F. (2008). Terhadap Pelayanan Publik. *Universitas Stuttgart*.
- Suganda, P., Sinarwati, N. K., & A, A. W. T. (2015). Penilaian Kinerja Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Berdasarkan Aspek Finansial Dan Non Finansial Pada Pt . Pln ( Persero ) Area Bali Utara. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).
- Sukamti, S., & Utomo, H. (2004). Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Pelayanan Publik di Puskesmas Kalicacing Kota Salatiga, 1–15.
- Susilowati, T. (2014). Studi Tentang Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan PT. POS Indonesia (PERSERO) di Kantor Pos Samarinda 7500, 2(4), 1787–1800.